



Perumusan Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Ukraina mengenai Bantuan Kemanusiaan

Novareza Rexlin

UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia; mogarexlin@gmail.com

Muhammad Indrawan Jatmika

UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia; m.indrawan.hi@upnjatim.ac.id

| Submit: 08-01-2024

| Accept: 28-06-2024

| Publish: 13-08-2024 |

Keywords

*UK, Ukraine,
Domestic Politics,
Foreign Policy,
Humanitarian Aid.*

ABSTRACT

The main objective of this research is to understand in depth how international norms become basic values in the formulation of foreign policy by the British government towards Ukraine, especially in responding to the invasion carried out by Russia. The research method used is a descriptive qualitative approach. This approach allows us to deeply understand the domestic factors that influence British foreign policy towards Ukraine. The data collection techniques used involve literature and documentation studies. We conduct data analysis by collecting, classifying, and presenting data in various forms, such as charts, flowcharts, texts, and narratives. In analyzing this study, we use the domestic level of analysis approach and understand the concept of Foreign Aid as one of the foreign policy tools. The study results show that the implementation of British humanitarian aid policy towards Ukraine is influenced by various domestic political actors, including Bureaucrats, Legislative Bodies, MIC (Military-Industrial Complex), Interest Groups, Political Parties, and Public Opinion. The decision to support and implement humanitarian aid policies to Ukraine is based on humanitarian values, defense of sovereignty, democratic rights, and peace. The perspectives and actions of these actors play a key role in shaping UK foreign policy towards Ukraine, and decisions on the implementation of humanitarian aid policy are taken with these factors in mind.

Kata Kunci

Inggris, Ukraina,
Politik Domestik,
Kebijakan Luar
Negeri, Bantuan
Kemanusiaan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana norma internasional menjadi nilai dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri oleh pemerintah Inggris terhadap Ukraina, khususnya dalam merespons invasi yang dilakukan oleh Rusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami secara mendalam mengenai faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris terkait Ukraina. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan studi pustaka dan dokumentasi. Kami melakukan analisis data dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyajikan data dalam berbagai bentuk, seperti bagan, flowchart, teks, dan narasi. Dalam menganalisis penelitian ini, kami menggunakan pendekatan *domestic level of analysis* dan memahami konsep Bantuan Luar Negeri sebagai salah satu alat kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan Inggris terhadap Ukraina dipengaruhi oleh berbagai aktor politik domestik, termasuk Birokrat, Badan Legislatif, MIC (Military-Industrial Complex), Kelompok Kepentingan, Partai Politik, dan Opini Publik. Keputusan untuk mendukung dan memberlakukan kebijakan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, pertahanan kedaulatan, hak demokrasi, dan perdamaian. Sudut pandang dan aksi dari aktor-aktor tersebut memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan luar negeri Inggris terkait Ukraina, dan keputusan implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

PENDAHULUAN

Pada 24 Februari 2022 Rusia secara resmi menyatakan perang dengan Ukraina yang dinyatakan langsung oleh Presiden Vladimir Putin. Invasi yang dilakukan Rusia mengundang perhatian negara-negara barat salah satunya Inggris. Pemerintah Inggris mengutuk keras atas tindakan Rusia karena dampak yang dirasakan Inggris setelah terjadinya peristiwa tersebut. *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* mengungkapkan jumlah korban jiwa mencapai 7.110 warga sipil tewas atas tragedi perang di Ukraina (Catelyn, 2023). Hal ini menyebabkan peningkatan pengungsi mencapai 180.000 di Inggris (Nemesh, 2023). Inggris merespon hal ini dengan menerapkan kebijakan sanksi pemutusan kerjasama dengan Rusia.

Meskipun begitu, sanksi ini justru dikhawatirkan memperburuk keadaan ekonomi Inggris setelah Brexit dan anjloknya poundsterling. Inggris mengalami inflasi mencapai 9,1% pada Mei 2022. Hal ini menyebabkan perdagangan Inggris diproyeksikan tertinggal dari negara Perancis dan pertumbuhan ekonomi akan stabil bergantung dengan berakhirnya konflik Rusia dan Ukraina (Inman, 2022). Meskipun Inggris menghadapi krisis ekonomi, Inggris memberlakukan kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina sebagai bentuk solidaritas. Inggris berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 347 juta poundsterling sebagai pasokan medis dan kebutuhan lainnya kepada penduduk Ukraina dan pengungsi di negara-negara tetangga hingga tahun 2025 (Loft, 2023). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik domestik mempengaruhi dalam implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan Inggris terhadap Ukraina tahun 2022. Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan bagi pembaca.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kebijakan Uni Eropa dalam memberikan bantuan militer kepada Ukraina di masa invasi Rusia. Uni Eropa menjatuhkan sanksi, menghentikan kerjasama dengan Rusia, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina sebesar 50 juta Euro hingga 500 juta Euro. Pendekatan yang digunakan adalah konstruktivisme dari Katzenstein dan Wendt. Katzenstein menjawab tiga kemungkinan kepentingan dari bantuan militer yang diberikan untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan Eropa, meningkatkan hubungan Uni Eropa secara ekonomi dan politik dan menjaga nilai dan norma demokrasi liberal di Ukraina (Umam, 2023). Silitonga (2017) menunjukkan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bantuan luar negeri pada konflik Georgia Rusia tahun 2008-2011. Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi, politik dan militer kuat. Kepentingannya dapat dicapai dengan terlibat kerja sama atau konflik internasional. Amerika Serikat mendukung Georgia dari segi finansial, bantuan pelatihan militer, menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia, dan mendukung keikutsertaan dalam NATO. Konsep bantuan luar negeri dan kepentingan nasional dari Morgenthau melihat bahwa bantuan yang diberikan menambah kekuatan politik bagi Amerika Serikat dari respon positif Georgia dan dunia internasional, memperoleh kekuasaan melalui status quo dengan membuat Georgia tidak bergantung pada Rusia dan meningkatkan kerja sama ekonomi, militer, dan budaya (Silitonga, 2017). M. Najib (2023) menunjukkan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik Rusia dan Ukraina menganalisis dengan menggunakan konsep kepentingan nasional. Beberapa hasil yang didapat yaitu Amerika Serikat memiliki kepentingan pertahanan untuk mencegah adanya ancaman penggunaan senjata nuklir dan NSNW oleh Rusia dalam konflik tersebut. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat yaitu penjatuhan sanksi kepada Rusia dan mengurangi ketergantungan sekutu Eropa pada suplai energi. Kepentingan tatanan dunia yang hendak dicapai yaitu menjaga stabilitas Eropa dan sekutu NATO, mempertahankan tatanan liberalisme dan mencegah eskalasi konflik yang lebih jauh dan melemahkan kemampuan Rusia agar tidak dapat melakukan agresi di masa depan. Terakhir, kepentingan ideologi yang ingin dicapai dengan menyebarluaskan pembangunan sistem pemerintahan yang demokrasi (Najib, 2023).

KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan bantuan kemanusiaan negara Inggris terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022 untuk mengetahui pengaruh politik domestik yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep *Foreign Aid as Foreign Policy Tool*. Kebijakan luar negeri merupakan strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi di dunia internasional (Goldstein & Pevehouse, 2014). Penelitian ini juga menggunakan Domestic Level Analysis. Menurut Goldstein tingkat analisis di dalam hubungan internasional dibagi menjadi empat tingkatan analisis, yaitu tingkat individu, tingkat domestik, tingkat antar negara dan tingkat (Goldstein & Pevehouse, 2014). Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh adanya tekanan politik domestik dan lingkungan internasional, sehingga kebijakan luar negeri jika tidak dapat diterima dalam lingkup domestik politik maka kemungkinan tidak dapat berhasil dalam lingkup internasional. Dalam politik domestik, tuntutan dan aspirasi merupakan pertimbangan politik luar negeri. Politik domestik dapat digambarkan sebagai kompetisi kepentingan dari institusi pemerintah (Masithoh, 2018). Terkait dengan mempertahankan kekuasaan politik, disesuaikan dengan meminimalisasi resiko domestik. Dengan berupaya untuk mempertahankan, menghadapi oposisi domestik untuk mendapatkan legitimasi domestik maupun internasional (Masithoh, 2018).

Dalam konteks ketidakstabilan ekonomi politik Inggris, upaya untuk mendapatkan legitimasi internasional melalui bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina merupakan langkah yang strategis. Pertama dengan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Ukraina dapat meningkatkan citra Inggris di mata komunitas internasional. Dalam situasi konflik dan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Ukraina, kepedulian terhadap nasib warga sipil dan dukungan terhadap upaya penanganan bencana dapat memberikan gambaran positif terhadap Inggris. Aktor-aktor utama yang terlibat dalam mendapatkan legitimasi internasional melalui bantuan kemanusiaan adalah pemerintah Inggris, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi non-pemerintah (NGO). Pemerintah Inggris dapat menggunakan platform PBB atau organisasi-organisasi kemanusiaan internasional untuk menyampaikan bantuan dan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam upaya penanggulangan krisis di Ukraina.

Selain itu, keterlibatan NGO, baik yang berasal dari Inggris maupun internasional, menjadi elemen penting dalam mendapatkan legitimasi. Keberadaan organisasi kemanusiaan yang secara mandiri berpartisipasi dalam upaya bantuan dapat menunjukkan komitmen Inggris terhadap nilai-nilai kemanusiaan global. Melibatkan sejumlah besar aktor ini dapat memperkuat pandangan bahwa Inggris bukan hanya bertindak demi kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi juga sebagai anggota komunitas internasional yang peduli terhadap permasalahan global. Dengan demikian, meskipun Inggris menghadapi ketidakstabilan ekonomi politik di tingkat domestik, langkah-langkah ini dapat menjadi cara efektif untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari komunitas internasional melalui upaya kemanusiaan di Ukraina. Pada tingkat analisis ini terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi politik domestik yaitu Birokrasi, Badan Legislatif, *Military-Industrial Complex*, Kelompok Kepentingan dan Partai serta Opini Publik.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode riset yang relevan. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini efektif dalam menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan dari objek penelitian yang menjadi fokus utama (Lexy, 2007). Sementara menurut Ramdhan, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena yang diteliti sesuai dengan fakta (Ramdhan, 2021). Karakter eksploratif penelitian deskriptif juga dipertegas oleh Ramdhan, yang menyatakan bahwa metode ini memberikan gambaran detail sebuah peristiwa dan mampu mengidentifikasi korelasi antara dua variabel atau lebih (Ramdhan, 2021). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan dokumentasi memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah analisis data mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian data, penyajian data dalam bentuk bagan, flowchart,

teks, maupun narasi, dan kemudian ditarik kesimpulan (Rezkia, 2020). Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan akurat terkait dengan fenomena yang diteliti. Keseluruhan proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap objek penelitian dan mendorong validitas temuan sesuai dengan fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Inggris

Inggris merupakan negara yang terbentuk pada tahun 1707 dengan wilayah England, Wales, Irlandia Utara dan Skotlandia. Inggris memiliki sistem politik yang sesuai dengan prinsip monarki konstitusional dengan asas demokrasi liberal dan sistem pemerintahan parlementer (Siregar, 2022). Dalam konteks ini Raja atau Ratu berperan sebagai simbol kedaulatan negara dan tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan. Raja atau Ratu harus tunduk pada hukum, mengatur hanya dengan persetujuan parlemen, dan bertindak atas nasihat Menteri (Bulmer, 2014). Meskipun Raja atau Ratu tidak memiliki kekuasaan politik yang signifikan, mereka menjadi pihak netral dengan terlibat untuk memberikan pendapat atau sudut pandang kepada Perdana Menteri. Pada sistem pemerintahan Inggris yang menjunjung demokrasi, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat untuk bertanggung jawab dalam memutuskan kebijakan negara (Kridhaswari, 2018). Perdana Menteri memiliki wewenang untuk memantau efektifitas operasi layanan sipil dan lembaga pemerintah, menunjuk anggota pemerintah seperti anggota kabinet dan menteri serta berperan di dalam House of Commons (Lilly, 2023). Perdana Menteri di dalam *House of Commons* berperan untuk berinteraksi dengan anggota parlemen melalui forum dengan cara menjelaskan dan mempertahankan keberlangsungan kebijakan pemerintah, serta menjalankan fungsi-fungsi legislatif.

Badan legislatif Inggris terdiri dari *House of Commons* dan *House of Lords*. *House of Commons* sebagai badan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum menggunakan sistem distrik sebagai perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat. *House of Commons* memiliki wewenang menurunkan perdana menteri dan mengadakan pemilihan umum. Sedangkan, *House of Lords* merupakan badan yang beranggotakan bangsawan, Uskup Agung Gereja dan beberapa orang berjasa dan berprestasi kepada negara. Secara langsung anggota *House of Lord* ditunjuk oleh Ratu atau Raja Inggris. *House of Lord* tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan masa jabatan perdana menteri tetapi memiliki peran mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap beberapa kebijakan karena dianggap dapat memberikan wawasan dan sudut pandang yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan (Kridhaswari, 2018)

Lembaga eksekutif dan legislatif Inggris memiliki hubungan erat dalam menjaga kestabilan dan efisiensi operasional pemerintah (Benwell , 2011). Terdapat prosedur dan mekanisme yang sudah diterapkan untuk mengawasi legislatif terhadap eksekutif, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mencegah potensi dominasi eksekutif terhadap Parlemen. Seperti contoh prosedur "Question Time" merupakan alat yang efektif untuk memungkinkan anggota legislatif mengajukan pertanyaan kepada eksekutif dan memperoleh informasi secara langsung serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap Parlemen. Pembatasan jumlah menteri yang diizinkan duduk di *House of Commons* juga dilakukan untuk mencegah pengendalian parlemen terhadap eksekutif dan menghindari dominasi eksekutif dalam proses legislatif. Badan legislatif tetap memiliki kekuasaan secara formal untuk memberhentikan pejabat eksekutif dari jabatannya untuk menunjukkan bahwa badan legislatif memiliki kekuasaan kendali atas stabilitas dan kepercayaan terhadap eksekutif (Benwell , 2011). Pemisahan kekuasaan antara lembaga perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan warga negara. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan juga dapat diantisipasi dengan adanya Lembaga Yudikatif yang independen sebagai badan

untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum yang efektif sebagai penegakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang mendukung stabilitas pemerintahan (Benwell , 2011).

Faktor Birokrasi, Badan Legislatif, dan MIC Terkait Kebijakan Bantuan Kemanusiaan Inggris Terhadap Ukraina Pada Masa Invasi Rusia

Birokrasi

Perselisihan Rusia dan Ukraina telah terjadi pada tahun 2014 hingga pecah perang pada tanggal 24 Februari 2022. Pemerintah Inggris telah lama berdiri di sisi Ukraina untuk mendukung kedaulatan dan hak Ukraina. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pangeran William dan Catherine bahwa Inggris berpihakan kepada Ukraina dan tidak akan berubah untuk memperjuangkan masa depan (Burack, 2022). Setelah pecahnya perang Rusia dan Ukraina yang menimbulkan ketidakstabilan serta korba jiwa menuai banyak komentar dan dukungan. Dalam forum *Group of Seven* yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, memberi tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Perdana Menteri Johnson menyampaikan terkait respon Inggris menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Presiden Putin terhadap Ukraina. Pidato tersebut mencerminkan keputusan dan sikap resmi Pemerintah Inggris untuk menghadapi Rusia dengan meningkatkan dukungan internasional hingga langkah diplomatik yang diambil oleh Inggris untuk mengatasi konflik tersebut (UK Government , 2022).

Perdana Menteri Boris Johnson meyakini bahwa dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Inggris merupakan langkah yang tepat dan tidak dapat tergoyahkan karena mengingat perjuangan rakyat Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya. Boris Johnson secara tegas mengkritisi pidato Presiden Putin yang mencoba melegitimasi tindakan agresifnya dengan mengusulkan "demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina." Perdana Menteri menolak argumen ini sebagai upaya yang tidak beralasan dan justru menciptakan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan sikap tegasnya, Boris Johnson memberikan sinyal bahwa Inggris bersama dengan sekutunya akan terus mendukung kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina, serta menentang segala upaya untuk merebut kedaulatan negara Ukraina (BBC, 2022). Selain Perdana Menteri, Anggota Parlemen turut andil dalam mendukung Ukraina pada forum debat pada 24 Februari 2022. Anggota parlemen Edinburgh West Christine Jardine juga menunjukkan solidaritas dan dukungan dengan menjadi salah satu demonstran di ibu kota Skotlandia. Christine Jardine mengatakan bahwa aksi yang dilakukan pemerintah Rusia merupakan hal yang tidak dapat diterima (Ambrose & Brown, 2022).

Respons pemerintah Inggris terhadap krisis kemanusiaan yang muncul akibat Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mendapat dukungan kuat dari *The Foreign, Commonwealth & Development Office* untuk mengutamakan perlindungan individu yang paling rentan, seperti perempuan dan anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas di Ukraina dan sekitarnya. Menteri Luar Negeri, *Commonwealth & Pengembangan Office* (The Foreign, Commonwealth & Development Office) secara aktif terlibat dalam memberikan bantuan dan perlindungan yang dapat menyelamatkan jiwa bagi mereka yang membutuhkan di Ukraina serta berkomitmen untuk mendesak penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) sebagai tujuan utama, serta mendorong terciptanya akses kemanusiaan tanpa hambatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar bantuan kemanusiaan dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan secara efisien dan memberikan keamanan bagi masyarakat yang meninggalkan daerahnya. Upaya ini mencerminkan komitmen Pemerintah Inggris dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang mendalam akibat konflik di Ukraina (UK Government, 2023).

Pada tanggal 1 Maret 2022, The Right Honourable Dame Priti Patel DBE MP mengemukakan pandangannya terkait krisis di Ukraina, mengutamakan kerjasama antara pemerintah Inggris dan Ukraina karena hal ini menjadi bentuk menunjukkan solidaritas kepada Ukraina melalui berbagai

langkah konkret. Salah satunya dengan menyediakan bantuan kemanusiaan sebagai respons terhadap situasi kritis yang dihadapi oleh Ukraina. Selain itu, Dame Priti Patel juga menyoroti beberapa langkah lain yang dapat diambil untuk mendukung Ukraina, termasuk pembaharuan visa pengawasan, pelatihan tentara Ukraina, dan memberlakukan sanksi ekonomi. Langkah-langkah ini mencakup tindakan konkret untuk memperkuat posisi Ukraina dan memberikan dukungan nyata dalam upaya mereka untuk melindungi kebebasan dan demokrasi. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah Inggris untuk bersama-sama dengan Ukraina menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara Ukraina untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut (UK Government, 2022).

Pada forum debat yang berlangsung pada 21 Juni 2022, dukungan diplomatik dari Pemerintah Inggris telah secara tegas dideklarasikan dengan menegaskan komitmen untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Beberapa aspek yang dibahas yaitu pemulihan hak kedaulatan dan integrasi teritorial Ukraina yang telah terkendala oleh agresi Rusia. Pemerintah Inggris juga menunjukkan kepedulian terhadap aspek kemanusiaan dengan mengidentifikasi permasalahan krisis pangan dan potensi ketidakstabilan anggaran yang dapat berdampak pada kehilangan pekerjaan warga sipil. Selain itu, penegakan pertanggungjawaban atas tindakan Rusia juga dianggap esensial, mencerminkan pentingnya keadilan dan ketertiban internasional (UK Parliament, 2022). Pemerintah daerah wilayah London, Wales, Scottish, Oxford, North Kesteven, North Somerset, Newcastle, Hertford, Edinburgh dan jajaran pemerintah daerah lainnya merespons invasi Rusia terhadap Ukraina sebagai strategi perang hibrida dan menganggap rezim Putin sebagai sebuah kebohongan. Dalam upaya mendukung negara Ukraina, pemerintah daerah memainkan peran penting dengan fokus pada tingkat daerah dan khususnya di dewan-dewan kota. Kolaborasi yang antara pemerintah daerah, para kepala eksekutif, dan pemimpin politik di seluruh negeri mencari solusi terbaik untuk mendukung Ukraina.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah mengidentifikasi beberapa hal penting yang harus dilakukan. *Pertama*, aktif berupaya melibatkan warga Ukraina dalam struktur otoritas dan organisasi yang berada di daerah masing-masing dengan tujuan menggandeng masyarakat Ukraina dalam persiapan dan pelaksanaan bantuan kemanusiaan, termasuk penerimaan pengungsi dari Ukraina. Dengan melibatkan orang Ukraina secara langsung, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan upaya bersama yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan mendesak akibat konflik (Smith, 2022). Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat Ukraina dan menjalin solidaritas di tingkat daerah sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan perdamaian. *Kedua*, pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif dengan mengerahkan tim komunikasi yang bekerjasama untuk melawan dan menetralisir narasi yang dapat menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat di antara masyarakat Inggris untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat daerah. *Ketiga*, pemerintah daerah menjalankan rencana krisis dan keberlanjutan bisnis untuk mengantisipasi potensi serangan siber yang dapat diarahkan pada infrastruktur pemerintahan daerah dan pusat. *Keempat*, pemerintah daerah berupaya menyatukan pendapat komunitas sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya keterikatan sosial di tengah isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan dukungan terhadap Ukraina dalam menghadapi perbedaan pendapat, memelihara persatuan dan kesatuan di antara masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan pemahaman bersama (Smith, 2022).

Badan Legislatif

Satu hari setelah perang Rusia dan Ukraina tercetuskan, tanggal 25 Februari 2022 sebuah forum diadakan oleh anggota *House of Lords*. Forum ini dilakukan untuk membahas dan menganalisis kondisi serta situasi yang berkembang di Ukraina. Beberapa poin yang menjadi pembahasan di dalam forum anggota *House of Lords* adalah kondisi humaniter di Ukraina, respon internasional, implikasi ekonomi dan politik, langkah diplomatik dan strategi, serta langkah-langkah konkret yang dapat

diamambil oleh pemerintah Inggris dan komunitas internasional untuk menanggapi peristiwa ini secara efektif. Dalam forum tersebut, beberapa anggota memilih mengenakan pakaian berwarna kuning dan biru sebagai simbol solidaritas kepada rakyat Ukraina. Salah satu poin krusial yang menjadi bahan diskusi yaitu mengurangi ketergantungan energi serta dukungan kemanusiaan termasuk dalam pengiriman bantuan medis, pendidikan dan bantuan masyarakat seperti visa dan bantuan untuk pengungsi sebagai upaya untuk menyediakan perlindungan bagi masyarakat Ukraina yang membutuhkan.

Pada tanggal 1 Maret 2022, Lord Ponsonby of Shulbrede menyampaikan pendapat setuju terkait pandangan dan tanggapan pemerintah Inggris terkait invasi Rusia di Ukraina dalam pertemuan di *House of Commons*. Langkah tersebut diambil bertujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Ukraina dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi krisis (UK Parliament, 2022). *House of Commons* memiliki cara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui forum debat yang menjadi kesempatan anggota *House of Commons* mengajukan pertanyaan kepada lembaga eksekutif serta petinggi-petinggi lainnya. Di dalam forum debat yang dihadiri oleh Perdana Menteri Boris Johnson anggota parlemen turut berkomitmen mendukung dalam mengatasi disinformasi, mendukung adanya solusi penanganan pengungsi, dan bantuan untuk krisis kemanusiaan (UK Parliament, 2022).

Industri Militer

Industri militer menjadi salah satu pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara karena berpengaruh pada anggaran pertahanan. Dalam sejarah Industri militer Inggris memiliki peran yang signifikan dalam aspek ekonomi dan politik negara. Inggris mengutamakan pengembangan industri militer dengan fokus menghasilkan senjata dan peralatan militer untuk keperluan domestik dan ekspor senjata. Kontribusi industri militer bersumber pada hasil penjualan senjata, menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi teknologi. Namun setelah Perang Dunia II terjadi perubahan karena Inggris terlibat pada peristiwa pelucutan senjata setelah perang berakhir.

Hal ini menyebabkan adanya penurunan konsentrasi kebutuhan senjata dan peralatan militer. Secara otomatis dalam aspek ekonomi terdampak dan menciptakan tekanan dalam ekonomi Inggris. Pengeluaran anggaran untuk pertahanan turut menua kritik hingga abad ke 20 karena dianggap menghambat pembangunan dalam negeri yang menciptakan ketidakseimbangan ekonomi di Inggris (Edgerton, 2008). Pada tahun 2021 terjadi krisis biaya hidup dimana prioritas masyarakat beralih pada permasalahan rumah tangga dan mempertahankan lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, pemerintah menyadari perlunya menciptakan solusi ekonomi yang dapat memberikan manfaat ganda, tidak hanya dalam menjaga keamanan negara tetapi juga sebagai generator aktivitas ekonomi, penelitian, pembangunan, dan kebijakan luar negeri. Maka dari dapat disimpulkan industri militer memiliki hubungan yang kompleks terhadap ekonomi politik serta pengambilan kebijakan luar negeri (Loughlin, 2022).

Pada kasus invasi Rusia dan Ukraina Menteri Pertahanan lebih condong untuk memberikan alokasi dana dan peralatan dibandingkan dengan harus secara langsung berperang dalam peperangan Rusia dan Ukraina. Mengingat industri militer Inggris menua kritik maka pemerintah perlu mempertimbangkan bentuk kebijakan luar negeri yang diambil dalam invasi Rusia dan Ukraina. Salah satu bentuk kontribusi industri militer dilakukan yaitu dengan Menteri Pertahanan dan tiga belas pemimpin Eksekutif industri pertahanan melakukan pertemuan di Downing Street sebagai bentuk respon atas invasi Rusia ke Ukraina dengan merencanakan dukungan pendanaan. Tiga belas organisasi industri pertahanan yang hadir antara lain Airbus, Babcock, BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Northrop Grumman, QinetiQ, Raytheon, Rheinmetall, Saab, Supacat dan Thales Inggris. Hampir 295 proposal inovatif yang sudah diterima sebagai mempercepat dukungan

terhadap Ukraina terutama dalam alokasi dana. Diharapkan hal yang dilakukan dapat menjadi solusi bagi Inggris dalam bertindak mendukung Ukraina.

Alokasi dana pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi untuk Ukraina memenangkan pertempuran melawan Rusia. Menteri Pertahanan Ben Wallace mengatakan bahwa kekuatan dukungan dari industri militer Inggris selain memberikan bantuan militer kepada Ukraina juga mendukung pemerintah Inggris untuk berkomitmen memberikan dukungan 2,8 miliar poundsterling sebagai bantuan kemanusiaan dan hibah (UK Government, 2022). Dapat disimpulkan bahwa industri militer Inggris mengambil keputusan alokasi dana menjadi cara efisien mendukung bantuan kemanusiaan atas dasar mengedepankan sisi kemanusiaan, mendukung pertahanan kedaulatan negara Ukraina, mempertimbangkan kondisi dalam negeri, pandangan masyarakat terkait kritik, krisis ekonomi politik serta melihat kompleksitas konflik antara Rusia dan Ukraina.

Dukungan Kelompok Kepentingan dan Partai Serta Opini Publik dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Kemanusiaan Inggris

Inggris memiliki sistem politik yang didominasi oleh dua partai utama, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif, yang secara bergantian menduduki posisi pemerintahan dan oposisi. Posisi suatu partai dalam konteks politik, seperti sayap kiri, tengah, atau sayap kanan, memiliki dampak langsung terhadap kebijakan diperkenalkan saat berada di pemerintahan. Partai sayap kiri cenderung menganut pandangan sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka, dengan fokus pada keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Sementara itu, sayap kanan sesuai dengan ideologinya yang lebih konservatif, menekankan pada nilai-nilai konservatif seperti kebebasan individu, kebijakan pasar bebas, dan penekanan pada tanggung jawab pribadi (Kridhaswari, 2018). Walaupun sistem politik Inggris terfokus pada dominasi dua partai utama, dinamika internal dan pergeseran kebijakan membuktikan bahwa politik di negara ini tidaklah monolitik. Partai-partai kecil tetap memiliki peran penting dalam membentuk wacana politik dan memengaruhi arah kebijakan nasional.

Selain partai politik, dalam konteks demokrasi liberal, kelompok kepentingan memegang peran penting dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan berusaha menjalankan agenda sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif pada kepentingan umum. Prinsip kesetaraan akses menjadi landasan bagi kelompok kepentingan, di mana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak dibatasi oleh faktor seperti sumber daya atau status sosial. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi aspek penting, karena hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat secara terbuka siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Para pembuat kebijakan harus memiliki tanggung jawab kepada publik atas keputusan yang mereka buat, termasuk keputusan yang dipengaruhi oleh masukan dari kelompok kepentingan. Pada pengambilan kebijakan, pemerintah Inggris dan kelompok kepentingan biasanya melakukan pertemuan sebagai sarana untuk menyampaikan argumen mereka secara terbuka dan transparan dengan mengadakan sebuah pertemuan, kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan, memberikan masukan, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Partai

Dalam meyikapi konflik Rusia dan Ukraina, partai yang ada di Inggris memiliki pandangan yang berbeda. Partai Buruh yang dipimpin oleh Keir Starmer, menilai dalam perang Ukraina perlu adanya kerjasama dengan militer industri (Loughlin, 2022). Sir Keir Starmer, yang menjabat sebagai pemimpin oposisi Inggris dan berasal dari Partai Buruh, sedang menghadapi tantangan serius di dalam partainya terkait isu penandatanganan surat yang mengkritik NATO dalam konteks konflik di Ukraina. Permasalahan ini mencerminkan adanya sentimen pro-Rusia yang muncul dalam politik Inggris dan negara-negara demokrasi barat lainnya. Meskipun para anggota dari sayap kanan dan

sayap kiri Partai Buruh tetap menyuarakan simpati terhadap Ukraina, Sir Keir Starmer berusaha dengan keras untuk menjaga integritas Partai Buruh. Dalam upayanya untuk menegaskan posisi pro-NATO, Sir Keir Starmer bahkan mengancam untuk mengeluarkan anggota partai yang menentang pandangan tersebut.

Sebanyak 11 anggota parlemen Partai Buruh telah diperintahkan untuk mencabut dukungan mereka terhadap pernyataan "Hentikan Perang" yang mengkritik NATO. Situasi ini mencerminkan dinamika internal yang rumit di dalam Partai Buruh, di mana Sir Keir Starmer berusaha menjaga kesatuan partai di tengah perbedaan pandangan yang muncul. Tindakan tegasnya untuk menegakkan posisi pro-NATO dalam konteks konflik Ukraina mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh partai politik di era kontemporer, terutama ketika dihadapkan pada isu geopolitik yang kompleks dan sensitif (WSJ Opinion, 2022). Sentimen pro-Rusia semakin menyebar di berbagai kalangan politik di Inggris, termasuk di antara tokoh terkemuka seperti mantan pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, yang telah menandatangani pernyataan yang mendukung pandangan pro-Rusia. Konflik di Ukraina menjadi pemicu perbedaan pandangan di kalangan tokoh politik Inggris, dan hal ini mengungkapkan adanya ketidaksetujuan dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Rusia.

“We're giving a lot of aid, yes, and humanitarian aid is also important. I don't think the U.K. is doing enough for refugees at the present time. The numbers of refugees leaving Ukraine are enormous -- we're talking [more than] 10 percent of the entire population of Ukraine has left. And I was looking at some figures the other day: Poland has taken in a huge number and, in Warsaw, the school population has gone up by 40 percent in six weeks. And that's because they've taken in so many children. Well done, Poland, on taking them in, and well done on educating and supporting them. Britain has taken in, I think, 20,000, which is a tiny number. And there are 200,000 people in Britain that offered to host refugees. And so the government in Britain is totally out of line with public opinion on this.” (Tavberidze, 2022).

Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan Jeremy Corbyn di atas, kebijakan Inggris dalam merespon perang di Ukraina seharusnya mencakup berbagai upaya. Ia meyakini bahwa intervensi lebih awal dapat mencegah eskalasi konflik, melalui upaya diplomasi, negosiasi, atau langkah-langkah lain yang dapat mengurangi ketegangan dan menangani akar masalah konflik tersebut. Corbyn menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan, dan menyatakan bahwa tindakan Inggris dalam membantu para pengungsi masih kurang memadai. Dalam perspektifnya, respons yang lebih proaktif dari PBB dan negara-negara Barat dapat membentuk lingkungan internasional yang lebih stabil dan menghindari potensi konflik berskala besar. Jeremy Corbyn mendorong agar Inggris dan sekutunya terlibat secara lebih aktif dalam upaya penyelesaian damai, menekankan pentingnya mendukung bantuan kemanusiaan, dan merespon dengan tindakan konkret untuk membantu para pengungsi yang terdampak oleh perang di Ukraina (Tavberidze, 2022).

Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan dengan jumlah massa yang dimiliki. Tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan yaitu melalui aksi pengumpulan bantuan, unjuk rasa, penandatanganan petisi dan pemanfaatan media sosial untuk memperbanyak dukungan. Pada tanggal 24 Februari 2022, mahasiswa dari *Cambridge University Ukrainian Society* (CUUS) menyelenggarakan unjuk rasa di King's Parade sebagai tanda solidaritas terhadap Ukraina, yang saat itu sedang dihadapkan pada invasi pasukan Rusia. Demonstrasi ini melibatkan anggota CUUS yang menggunakan properti seperti papan bertuliskan "Hentikan Putin", "Isolasi Diktator", dan "Berdiri Bersama Ukraina". Mereka melakukan berbagai kegiatan, termasuk meneriakkan yel-yel, berpidato, dan menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina. Dalam semangat

solidaritas, mahasiswa berharap mendapatkan dukungan tidak hanya dalam bentuk simbolis, tetapi juga secara politis. Mereka menyuarakan aspirasi untuk mendapatkan dukungan konkret, seperti sanksi terhadap Rusia. Tidak hanya itu, para mahasiswa berencana untuk melanjutkan kegiatan unjuk rasa hingga di kedutaan besar Ukraina di London pada hari Sabtu mendatang. Rencananya, mereka akan mengorganisir pawai yang dimulai dari situs Sidgwick dan berakhir di Castle Mound (Isaacs, 2022).

Pada tanggal 27 Maret 2022, hari musim semi di Mayfair menyajikan pemandangan di sekitar Trafalgar Square, di mana segala sesuatu berubah menjadi warna biru dan kuning. Mulai dari papan nama Euro Car Parks hingga mobil-mobil van polisi dan sepeda motor, serta jaket hi-vis yang dikenakan oleh para penumpangnya, semuanya tercermin dalam kombinasi warna yang menciptakan suasana yang ceria. Namun, yang paling mencolok adalah ratusan bendera Ukraina yang berkibar di bawah Park Lane Hilton, menciptakan pemandangan yang mengesankan untuk mengikuti pawai London Stands with Ukraine menuju Trafalgar Square. Dalam aksi ini, kelompok-kelompok seperti *Stop the War* dan *Campaign for Nuclear Disarmament* (CND), yang biasanya terlibat dalam demonstrasi semacam ini, disayangkan belum terlihat berpartisipasi. Meskipun demikian, kehadiran ratusan bendera Ukraina dan dukungan yang terlihat dari masyarakat sekitar menandakan solidaritas yang kuat terhadap Ukraina dalam menghadapi situasi yang sulit. Acara ini tidak hanya menciptakan dukungan, tetapi juga menyiratkan adanya kesadaran dan keprihatinan yang mendalam terhadap isu-isu global yang sedang berlangsung (Anthony, 2022). Meskipun demikian, *Stop the War* tetap setia pada prinsip penolakan terhadap perang dan berusaha mencari solusi untuk mendukung hak rakyat Ukraina dalam menentukan nasibnya sendiri. Tindakan ini dilakukan melalui penandatanganan petisi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya perdamaian dan keadilan di Ukraina (Loughlin, 2022).

Pada 9 April 2022, serikat pekerja Inggris menggelar pawai protes dan rapat umum di Whitehall sebagai tanda solidaritas terhadap Ukraina. Dalam aksi tersebut, serikat pekerja menyerukan penarikan segera pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina dan mendesak gencatan senjata segera. Demonstran juga menuntut pemerintah Inggris untuk menerima pengungsi dari Ukraina tanpa penundaan. Aksi ini mendapat dukungan dari lima federasi serikat pekerja Ukraina, termasuk pekerja tambang dari wilayah Donbas. Selain itu, serikat pekerja Inggris seperti Partai Buruh GMB, ASLEF, CWU, NUM, TSSA, PCS, BFAWU, dan UCU juga ikut mendukung demonstrasi. Mykhailo Volynets, ketua Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Ukraina (KVPU), menekankan perlunya bantuan militer, keuangan, dan kemanusiaan bagi Ukraina.

Mykhailo Volynets mengajukan permohonan kepada profesor untuk mendorong pemerintah Inggris memberikan bantuan ini kepada Ukraina serta memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap Federasi Rusia. Aksi ini diprakarsai oleh Ukraine Solidarity Campaign dengan tujuan memperkuat hubungan antara gerakan buruh dan serikat buruh Inggris dengan rekan-rekan mereka di Ukraina, sekaligus memberikan dukungan kepada komunitas Ukraina di Inggris. USC, yang telah aktif hadir dalam semua demonstrasi besar untuk mendukung Ukraina, juga telah mengorganisir delegasi anggota parlemen Inggris, pemimpin serikat buruh, dan aktivis masyarakat sipil untuk mengunjungi Kyiv empat hari sebelum pecahnya perang (Another Europe is Possible , 2022).

Disamping itu industri perkeretaapian dan pemerintah Inggris bekerja sama untuk berkontribusi dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina sebagai respons terhadap krisis yang sedang terjadi. Program UK Rail for Ukraine dilakukan terjadi di awal Februari melibatkan beberapa perusahaan seperti Network Rail, Symposium Consulting, DB Cargo UK, LNER, Avanti, MTR Elizabeth Line, dan The Veterans Charity, untuk mengumpulkan bantuan. Kereta bantuan pertama diberangkatkan oleh layanan khusus DB Cargo UK menuju Ukraina dengan membawa lebih dari 1.500 ton bantuan, termasuk makanan, produk kebersihan dan medis, kebutuhan pokok dan pasokan lainnya. Andrea Rossi dari DB Cargo UK dan David Horne dari London North Eastern Railway, mengatakan bahwa terdapat kepuasan untuk dapat berkontribusi dalam mendukung upaya bantuan

kemanusiaan (Walton, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa industri perkeretaapian Inggris berkomitmen tinggi dalam mendukung kemanusiaan dan membantu masyarakat Ukraina dalam situasi darurat.

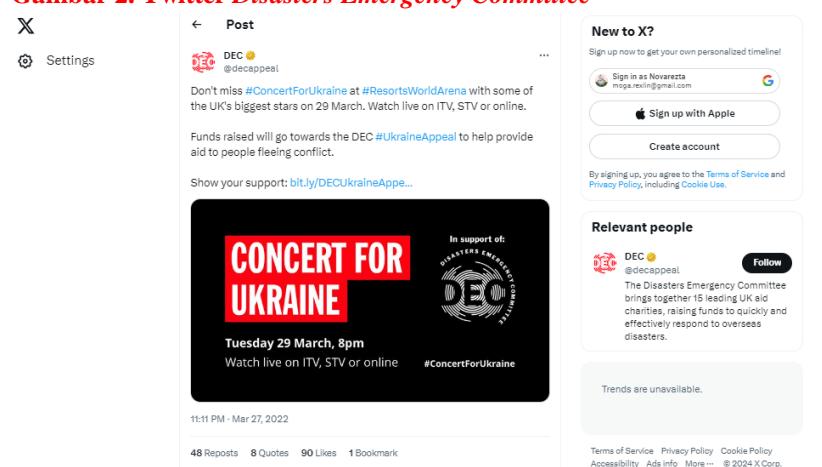
Media sosial merupakan platform yang efektif dan efisien dalam menyuarakan dukungan. Seperti yang dilakukan oleh London Hub menggunakan platform twitter untuk menyuarakan dukungan kepada Ukraina (Ukraine Club London, 2022). Komunitas *Disasters Emergency Committee* dan *Campaign Against Arms Trade* juga memberikan bantuan kemanusiaan dengan cara menjadi *volunteer* untuk menggalang dana dan dukungan untuk Ukraina. Komunitas kemanusiaan yang ada di Inggris memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Website, Instagram, YouTobe dan media sosial sejenisnya untuk memberikan informasi terbaru terkait perkembangan konflik serta kegiatan yang dilakukan para *volunteer*. Dengan menggunakan teknologi dan memanfaatkan digitalisasi dapat menjadikan cara yang efektif dan efisien dalam memengaruhi masyarakat luas hingga pemerintah.

Gambar 1. Website *Campaign Against Arms Trade*



Sumber: (Campaign Against Arms Trade, 2022)

Gambar 2. Twitter *Disasters Emergency Committee*



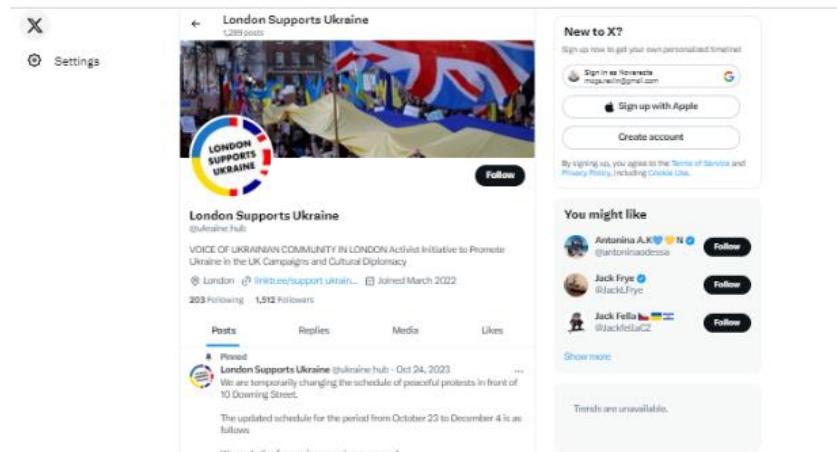
Sumber: (Disasters Emergency Committee, 2022)

Gambar 3. YouTube Disasters Emergency Committee



Sumber: (Disasters Emergency Committee, 2022)

Gambar 4. Twitter London Hub



Sumber: (Ukraine Club London, 2022)

Opini Publik

Opini publik menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan karena didalamnya terdapat kepentingan masyarakat. Dengan adanya perkembangan digital opini publik semakin mudah meluas melalui media informasi, terutama melalui penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, hingga Tiktok yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pada tanggal 25 Februari 2022 Pangeran Harry dan Meghan, sebagai tokoh publik yang sangat dikenal, memberikan tanggapan terkait isu geopolitik global. Dalam pernyataannya, mereka menyampaikan komitmen untuk mendukung rakyat Ukraina dalam menentang pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan yang terjadi. Respons Pangeran Harry dan Meghan dapat diartikan sebagai upaya memobilisasi opini publik dan memperkuat panggilan global untuk tindakan kolektif demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional (Scobie, 2022).

Pada tanggal 26 Februari 2022, terjadi protes dan demonstrasi di beberapa lokasi di London, Manchester, dan Edinburgh, yang melibatkan pengunjuk rasa yang mengecam tindakan Rusia dalam konflik Ukraina. Kedua kedutaan besar Rusia dan Downing Street di London menjadi pusat perhatian, dimana demonstran mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dengan melemparkan telur ke kedutaan dan menuliskan pesan-pesan protes menggunakan kapur di dinding luar. Aksi protes ini juga disertai dengan teriakan yel-yel, seperti "Rusia hentikan perang", "Putin hentikan perang", dan "tinggalkan Ukraina". Para demonstran menunjukkan dukungan mereka terhadap Ukraina dengan berbagai cara, seperti meletakkan bunga dan menulis pesan di trotoar di luar Konsulat Jenderal Rusia di Edinburgh.

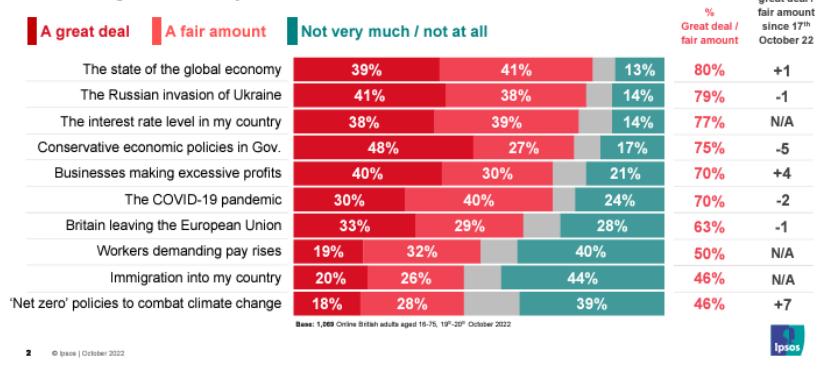
Di Bristol, pengunjuk rasa berkumpul di dekat katedral untuk menyuarakan dukungan mereka bagi Ukraina. Tak hanya itu, beberapa bangunan terkenal seperti London Eye, 10 Downing Street, dan Katedral Lincoln juga diterangi dengan warna kuning dan biru sebagai bentuk nyata solidaritas terhadap Ukraina. Aksi ini mencerminkan reaksi keras dan dukungan internasional terhadap peristiwa tragis yang tengah terjadi di Ukraina (Zaccaro & Faulkner, 2022).

Pada tanggal 27 Februari 2022, kota London, terutama Trafalgar Square, menjadi saksi dari gelombang besar unjuk rasa yang melibatkan ribuan massa dari masyarakat Inggris. Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap invasi Rusia yang terjadi di Ukraina. Dengan mengenakan atribut serba biru dan kuning, para peserta aksi unjuk rasa mengekspresikan solidaritas mereka dengan Ukraina. Tidak hanya terbatas di London, protes ini juga merambat ke berbagai kota di Inggris seperti Newcastle, Brighton, Exeter, Edinburgh, Glasgow, Nottingham, Cambridge, Oxford, Norwich, Mumbles, dan Swansea. Tak hanya memprotes invasi Rusia, aksi unjuk rasa ini juga mencakup seruan kepada warga Rusia agar melawan pemerintahan mereka sendiri. Pesan ini menjadi satu bagian dari rangkaian demonstrasi global yang mengecam tindakan agresif Rusia dan mendukung upaya perdamaian di Ukraina. Aksi ini menciptakan suatu ruang di mana suara masyarakat dapat didengar dan menjadi contoh bagaimana solidaritas internasional dapat diwujudkan melalui tindakan langsung dan tuntutan damai (Ambrose & Brown, 2022).

Gambar 5. Faktor-faktor meningkatnya biaya hidup di Inggris

What factors contribute to Britain's rising cost of living?

How much, if at all, do you think each of the following are contributing to the rising cost of living in Britain today?

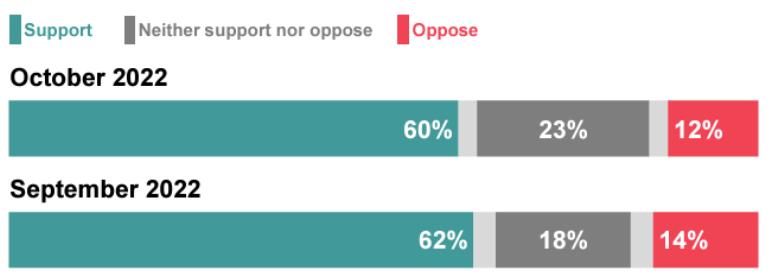


Sumber: (Ipsos, 2022)

Gambar 6. Persentase dukungan masyarakat peran Inggris di Ukraina

Two in five support Britain's current role in Ukraine

As you may know, the UK government is providing a range of economic, humanitarian and defensive military assistance to Ukraine, and is imposing additional sanctions on Russia and Belarus.
 To what extent, if at all, do you support or oppose Britain's current role in the Ukraine conflict?

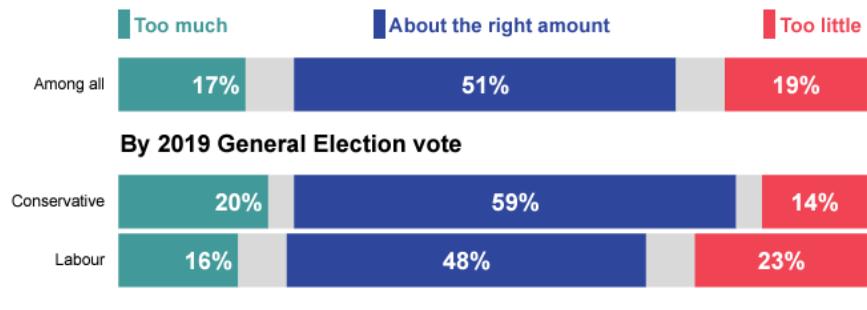


Sumber: (Ipsos, 2022)

Gambar 7. Jumlah dukungan terhadap dukungan yang diberikan pemerintah Inggris untuk Ukraina

Half say the UK has provided about the right amount of support to Ukraine

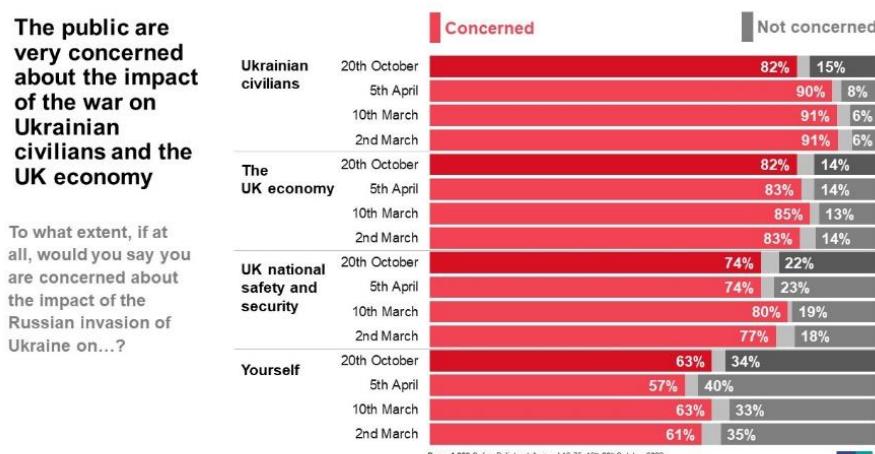
And taking everything into account, do you think the UK has provided too much, too little, or about the right amount of support to Ukraine?



Sumber: (Ipsos, 2022)

Survei dilakukan setelah tujuh bulan invasi Rusia dan Ukraina berlangsung. Sebagian besar orang Inggris percaya bahwa invasi Rusia ke Ukraina berkontribusi pada kenaikan biaya hidup di Inggris sebesar 79%. Meskipun masyarakat Inggris beranggapan bahwa situasi ini berdampak pada biaya hidup, sebesar 60% dari mereka mendukung peran Inggris dalam konflik tersebut. Dukungan ini melibatkan pemberian bantuan ekonomi, kemanusiaan, dan pertahanan militer kepada Ukraina. Sebanyak 51% responden berpendapat bahwa Inggris telah memberikan dukungan yang tepat untuk Ukraina. Meskipun 17% dari responden berpendapat bahwa Inggris telah memberikan terlalu banyak dukungan, sedangkan 19% beranggapan bahwa dukungan yang diberikan masih terlalu sedikit. Hasil survei ini mengambarkan persepsi yang beragam di kalangan masyarakat terkait keterlibatan Inggris dalam memberikan dukungan kepada Ukraina (Ipsos, 2022).

Gambar 8. Persentase tingkat keprihatinan masyarakat terhadap warga sipil Ukraina

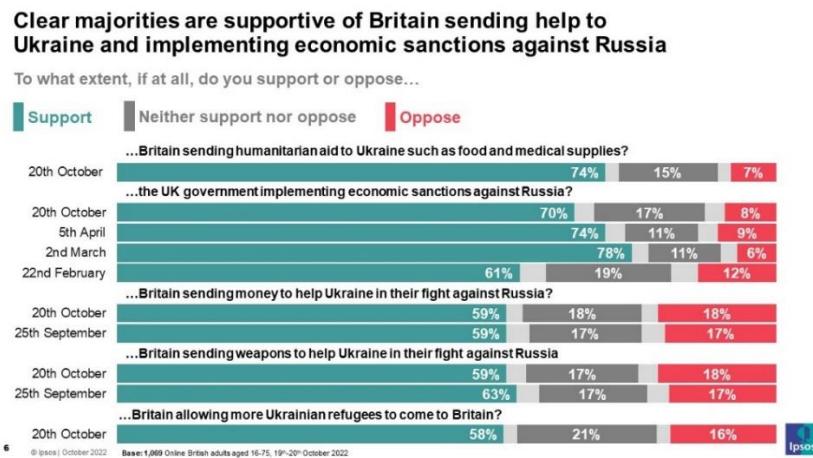


Sumber: (Ipsos, 2022)

Survei sebanyak 82% menunjukkan tingkat keprihatinan Inggris terhadap konflik terhadap warga sipil Ukraina. Survei juga mencatat bahwa 82% dari publik mengekspresikan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi konflik di Ukraina (Ipsos, 2022). Keiran Pedley, Direktur Riset Politik di Ipsos, mengungkapkan bahwa temuan data dukungan lapangan terus meningkat untuk

Ukraina dari publik Inggris. Mayoritas memberikan dukungan terhadap peran Inggris dalam mendukung Ukraina, sejalan dengan rasa simpati. Meskipun ada kekhawatiran terkait dampak perang terhadap ekonomi Inggris, sebagian besar responden tetap mendukung penerapan sanksi. Mereka meyakini bahwa sanksi tersebut diperlukan, bahkan dengan kenaikan harga energi dan makanan sebagai konsekuensinya (Ipsos, 2022).

Gambar 9. Dukungan masyarakat terhadap pengiriman bantuan pemerintah Inggris ke Ukraina dan penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia



Sumber: (Ipsos, 2022)

Dalam kasus invasi Rusia Ukraina pemerintah melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan seperti makanan hingga obat-obatan di dukung oleh masyarakat Inggris dengan responden sebesar 74%, 15% netral dan 7% menentang pada 20 Oktober 2022. Masyarakat Inggris mendukung dalam implementasi sanksi ekonomi sebesar 70%, netral 17% dan menentang 8% pada 20 Oktober 2022. Meskipun lebih banyak orang Inggris yang terus mendukung sanksi dalam menghadapi kenaikan harga energi lebih lanjut daripada menentangnya, ada tanda-tanda bahwa dukungan ini terbatas. Masyarakat Inggris juga mendukung pemerintah untuk mengirimkan uang untuk membantu Ukraina sebesar 59%, mendukung mengirimkan senjata 58%, dan mengizinkan pengungsi untuk datang ke Inggris sebesar 58% pada bulan Oktober 2022 (Ipsos, 2022).

KESIMPULAN

Sistem pemerintah Inggris memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah dan tujuan implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan. Dalam konteks politik domestik, aktor seperti Pangeran William, Kate Middleton, Perdana Menteri Boris Johnson, anggota parlemen, Menteri Luar Negeri Dame Priti Patel, diplomat, dan pemerintah daerah dari berbagai wilayah memiliki pengaruh yang kritis. Birokrasi Inggris berupaya mencari solusi yang mendukung pemerintah Ukraina, salah satunya melalui pengiriman bantuan kemanusiaan. Kebijakan ini diimplementasikan dengan tujuan memperjuangkan hak dan kebebasan warga Ukraina, mendukung atas dasar kemanusiaan, serta mempertahankan kedaulatan dan memberikan keamanan bagi warga Ukraina melalui fasilitas bantuan yang disediakan oleh pemerintah Inggris. Badan legislatif Inggris turut memfasilitasi debat forum untuk mencari solusi terbaik, menunjukkan solidaritas tinggi dalam mendukung bantuan kemanusiaan kepada Ukraina.

Keputusan kebijakan, termasuk alokasi dana yang didukung oleh industri militer, didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, pertahanan kedaulatan Ukraina, kondisi dalam negeri, dan kompleksitas konflik antara Rusia dan Ukraina. Partai politik Inggris memiliki pandangan yang beragam terkait invasi Rusia dan Ukraina. Partai Buruh melihat solusi militer, sementara Partai Hijau mendukung pendekatan berkelanjutan untuk membantu Ukraina. Kelompok kepentingan di Inggris, termasuk Stop

the War, Support Ukraine, Disasters Emergency Committee, dan Campaign Against Arms Trade, berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui demo, kampanye media sosial, petisi, demonstrasi, dan dukungan kemanusiaan. Pentingnya opini publik terlihat dalam respons Pangeran Harry dan Meghan serta demonstrasi massa dan petisi dari masyarakat Inggris. Survei opini publik mencerminkan keprihatinan tinggi terhadap warga Ukraina, dengan harapan perdamaian dan tindakan kemanusiaan dari pemerintah Inggris. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri juga menjadi faktor penting.

Tujuan pemerintah Inggris sebagai bagian dari legitimasi internasional dalam pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Ukraina mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, pemerintah Inggris berupaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan memenuhi standar kemanusiaan internasional, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, netralitas, dan kesukarelaan. Dalam konteks ini, pemerintah Inggris berusaha untuk memperoleh dukungan dan pengakuan dari lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi kemanusiaan global lainnya, guna memvalidasi tindakan kemanusiaan mereka di Ukraina. *Kedua*, pemerintah Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk negara-negara lain dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan distribusi bantuan yang efektif dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup koordinasi logistik, tetapi juga menghormati kedaulatan Ukraina dan memastikan bahwa intervensi kemanusiaan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Dengan demikian, pemerintah Inggris berharap mendapatkan dukungan dan persetujuan dari komunitas internasional atas upaya kolaboratif mereka. Selain itu, dalam mencapai tujuan eksternal, pemerintah Inggris menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian internasional. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung, tetapi juga untuk memperkuat posisi moral dan etis pemerintah Inggris di panggung internasional. Dengan mendukung prinsip-prinsip tersebut, pemerintah Inggris berharap membangun legitimasi internasional yang kuat untuk tindakan kemanusiaan mereka di Ukraina, yang pada gilirannya dapat memperkuat keberlanjutan dan efektivitas upaya bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambrose, T., & Brown, a. M. (2022, Februari 27). *Thousands gather in cities across the UK in support of Ukraine*. Diambil kembali dari [www.theguardian.com](https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/thousands-gather-in-cities-across-the-uk-in-support-of-ukraine):
- Another Europe is Possible . (2022, April 7). *London: Trade unions rally to support Ukraine!* Diambil kembali dari [www.anothereurope.org](https://www.anothereurope.org/london-trade-unions-rally-to-support-ukraine/):
- Anthony, A. (2022, Maret 27). *March in support of Ukraine in London: everything was turning blue and yellow*. Diambil kembali dari [www.theguardian.com](https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/27/march-in-support-of-ukraine-in-london-everything-was-turning-blue-and-yellow):
- Apodaca, C. (2017, April 26). *Foreign Aid as Foreign Policy Tool*. Diambil kembali dari [oxfordre.com](https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.acrefore-9780190228637-e-332):
- BBC. (2022, Februari 24). *Ukraine Statement by the Prime Minister*. Diambil kembali dari [www.bbc.co.uk](https://www.bbc.co.uk/programmes/m0015944):
- Benwell , R. (2011). *The Separation of Powers*. Diambil kembali dari [parliament.uk](https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06053/SN06053.pdf):
- Bulmer, E. (2014). *Constitutional Monarchs in Parliamentary Democracies*. Stockholm: International IDEA .
- Burack, E. (2022, Maret 01). *Ukrainian President Volodymyr Zelensky Tweets About Prince William and Kate Middleton*. Diambil kembali dari www.townandcountrymag.com:

- <https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a39280274/ukraine-volodymyr-zelensky-tweets-gratitude-prince-william-kate-middleton/>
- Campaign Against Arms Trade. (2022, Maret 30). *STATEMENT ON THE WAR IN UKRAINE*. Diambil kembali dari caat.org.uk: <https://caat.org.uk/news/statement-on-the-war-in-ukraine/>
- Catelyn, A. (2023, Maret 06). *11 Fakta Menggerikkan Terkait Dampak Perang Rusia Ukraina Selama Satu Tahun*. Diambil kembali dari www.liputan6.com: <https://www.liputan6.com/global/read/5225330/11-fakta-mengerikan-terkait-dampak-perang-rusia-ukraine-selama-satu-tahun?page=4>
- Disasters Emergency Committee. (2022, Maret 22). *UKRAINE HUMANITARIAN APPEAL LATEST UPDATES*. Diambil kembali dari www.dec.org.uk: <https://www.dec.org.uk/news-feed/5339?newscard=69>
- Edgerton, D. (2008). The British military-industrial complex in. *The Economics of Peace and Security Journal*.
- Goldstein, J., & Pevehouse, J. C. (2014). *International Relations*. New York: Pearson Longman.
- Inman, P. (2022, Juli 08). *Six charts that show how the UK economy is in crisis*. Diambil kembali dari www.theguardian.com: <https://www.theguardian.com/business/2022/jul/08/six-charts-that-show-how-the-uk-economy-is-in-crisis>
- Ipsos. (2022, Oktober 31). *Public continues to support Britain's role in Ukraine conflict*. Diambil kembali dari www.ipsos.com: <https://www.ipsos.com/en-uk/public-continues-support-britains-role-ukraine-conflict>
- Isaacs, L. (2022, Februari 24). *Students rally in support of Ukraine*. Diambil kembali dari www.varsity.co.uk: <https://www.varsity.co.uk/news/23207>
- Kridhaswari, E. (2018). Upaya UKIP (UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY) Memanfaatkan Isu Krisis Pengungsi Dalam Rederendum Brexit Tahun 2016 .
- Lexy, M. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lilly, A. (2023, November 13). *Ministers in the Lords – their role and scrutiny*. Diambil kembali dari www.instituteforgovernment.org.uk: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/lords-ministers-role-scrutiny>
- Loft, P. (2023, Juli 20). *Ukraine: UK aid and humanitarian situation 2022-23*. Diambil kembali dari commonslibrary.parliament.uk: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9467/>
- Loughlin, K. M. (2022, Oktober 24). *Ukraine, the British left, and the military-industrial complex*. Diambil kembali dari lse.ac.uk: <https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/ukraine-the-british-left-and-the-military-industrial-complex/>
- Masithoh, N. (2018). Pengaruh Politik Domestik terhadap Kebijakan Luar Negeri: Kasus Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) ke 19 Negara di Kawasan Timur Tengah. *Political Science*. Diambil kembali dari <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/75520>
- Najib, M. (2023). Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Konflik Rusia-Ukraina.
- Nemesh, Y. (2023, Agustus 23). *Why thousands of Ukrainian refugees in the UK are now homeless*. Diambil kembali dari theconversation.com: <https://theconversation.com/why-thousands-of-ukrainian-refugees-in-the-uk-are-now-homeless-210234#:~:text=Since%20February%202022%2C%20over%20180%2C000,no%20links%20to%20the%20UK.>
- Ramdhani, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rezkia, S. M. (2020, September 11). *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Diambil kembali dari dqlab.id: <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>
- Scobie, O. (2022, Februari 25). *Prince Harry and Duchess Meghan Urge World Leaders To Support Ukraine*. Diambil kembali dari www.harpersbazaar.com: <https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a39223620/prince-harry-meghan-markle-condemn-russian-invasion-ukraine-support/>
- Silitonga, D. (2017). Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Bantuan Luar Negeri Ke Georgia Dalam Konflik Georgia Rusia 2006-2011. *Universitas Andalas*.

- Siregar, N. F. (2022). Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1-12.
- Smith, C. (2022, Maret 08). *Local government's response to Russia's war on Ukraine*. Diambil kembali dari The MJ.co.uk: <https://www.themj.co.uk/Local-governments-response-to-Russia-s-war-on-Ukraine/222772>
- Tavberidze, V. (2022, Mei 07). *Former U.K. Labour Leader Corbyn: Ukraine War Is 'Disgraceful' And Russia's 'Wrong At Every Level'*. Diambil kembali dari www.rferl.org: <https://www.rferl.org/a/ukraine-corbyn-interview-russia-cease-fire/31838717.html>
- UK Government . (2022, Februari 24). *PM statement to the House of Commons on Ukraine: 24 February 2022*. Diambil kembali dari www.gov.u: <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-ukraine-24-february-2022>
- UK Government. (2022, Maret 2022). *Home Secretary statement on humanitarian support for Ukrainians*. Diambil kembali dari www.gov.uk: <https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-statement-on-humanitarian-support-for-ukrainians>
- UK Government. (2022, Juni 20). *Praise for Ukraine support as Defence industry offers more help*. Diambil kembali dari www.gov.uk: <https://www.gov.uk/government/news/praise-for-ukraine-support-as-defence-industry-offers-more-help>
- UK Government. (2023, Juli 06). *Transparency data UK government's humanitarian response to Russia's invasion of Ukraine*. Diambil kembali dari www.gov.uk: [https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-humanitarian-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-facts-and-figures](https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-humanitarian-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-facts-and-figures/uk-governments-humanitarian-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-facts-and-figures)
- UK Parliament. (2022, Februari 24). *Ukraine Volume 709: debated on Thursday 24 February 2022*. Diambil kembali dari hansard.parliament.uk: <https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-24/debates/A76282B2-C1F4-4D00-B5E8-A8A0F2476FBB/Ukraine>
- UK Parliament. (2022, Maret 2022). *Ukraine Volume 819: debated on Wednesday 2 March 2022*. Diambil kembali dari hansard.parliament.uk: <https://hansard.parliament.uk/Lords/2022-03-02/debates/8C84A8B1-EFBF-4783-892F-2FF1FD217B3F/Ukraine>
- UK Parliament. (2022, Juni 21). *Ukraine: British Diplomatic Support Volume 716: debated on Tuesday 21 June 2022*. Diambil kembali dari hansard.parliament.uk: <https://hansard.parliament.uk/Commons/2022-06-21/debates/B905D9F4-0908-45D8-AB7C-DF73DC9DA4AC/UkraineBritishDiplomaticSupport>
- Ukraine Club London. (2022). *SUPPORT UKRAINE COORDINATION HUB*. Diambil kembali dari www.supportukraine.uk: <https://www.supportukraine.uk/>
- Umam, K. (2023). Kebijakan Uni Eropa Dalam Memberikan Bantuan Militer Kepada Ukraina Di Masa Invasi Rusia. *Political Science*.
- Walton, S. (2022, April 13). *UK rail industry sends humanitarian aid train to Ukraine*. Diambil kembali dari www.railtech.com: <https://www.railtech.com/rolling-stock/2022/04/13/uk-rail-industry-sends-humanitarian-aid-train-for-ukraine/?gdpr=deny>
- WSJ Opinion. (2022, Maret 01). *Britain's Labour Party to Ukraine's Defense*. Diambil kembali dari www.wsj.com: <https://www.wsj.com/articles/britains-labour-to-the-defense-keir-starmer-russia-ukraine-vladimir-putin-pacifism-11646167892>
- Zaccaro, M., & Faulkner, &. D. (2022, Februari 26). *Ukraine conflict: Protests held around UK in support of Ukraine*. Diambil kembali dari www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/uk-60536064>

BIOGRAFI

Novareza Rexlin merupakan mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ketertarikannya dalam menganalisis terkait kebijakan luar negeri serta bantuan luar negeri.

Muhammad Indrawan Jatmika adalah seorang dosen pada program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN Veteran Jawa Timur. Ketertarikannya pada bidang Kebijakan Luar Negeri, Bantuan Luar Negeri dan Studi Kawasan Asia Tenggara.